

EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BITUNG PERIODE TAHUN 2019-2024

Widyawati Bugis¹, Een N. Walewangko, Wensy F. Israel Rompas³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115. Indonesia

E-mail: wwidia051@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan realisasi anggaran belanja pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung selama periode Tahun 2019–2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik sebagai payung besar, dengan Konsep Value for Money (khususnya rasio efektivitas dan efisiensi) sebagai alat analisis utama untuk mengukur kinerja BAPPEDA Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD, Renja, Renstra), serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BAPPEDA Kota Bitung dari tahun anggaran 2019 hingga 2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterpaduan antara dokumen perencanaan dengan implementasi program, serta tingkat kedisiplinan dan keberhasilan BAPPEDA Kota Bitung dalam menyerap dan membelanjakan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Analisis ini akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja BAPPEDA.

Kata kunci : Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Realisasi Anggaran Belanja, BAPPEDA, Kota Bitung.

ABSTRACT

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of regional development planning and budget realization at the Bitung City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Office during the 2019–2024 period. Effective development planning and budget management are key indicators in achieving good governance and improving public welfare. The theory used in this study is the Public Sector Performance Accountability Theory as a broad umbrella, with the Value for Money Concept (especially the effectiveness and efficiency ratio) as the main analytical tool to measure the performance of the Bitung City BAPPEDA. This study uses a quantitative descriptive method with a case study approach. The data used are secondary data in the form of development planning documents (such as RPJMD, Renja, Renstra), as well as the Budget Realization Report (LRA) of the Bitung City BAPPEDA from the 2019 to 2024 fiscal years. The effectiveness of planning is measured through the level of achievement of predetermined program and activity targets, while the effectiveness of budget realization is measured using the ratio between expenditure realization and the predetermined budget target. The research results are expected to provide an overview of the level of integration between planning documents and program implementation, as well as the level of discipline and success of the Bitung City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in absorbing and spending the budget according to the established plan. This analysis will identify factors that support and inhibit the effectiveness of BAPPEDA's performance.

Keywords: Effectiveness, Development Planning, Budget Realization, BAPPEDA, Bitung City.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara atau daerah. Secara umum, pembangunan dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pelayanan publik, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan pun terus bertambah. Oleh karena itu, pembangunan menjadi sarana penting untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dalam konteks ekonomi, pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, dari sisi sosial, pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya berdasarkan kebutuhan realitas suatu daerah, sebagaimana dinyatakan Kuncoro (2012:43), bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan kebutuhan dan realitas suatu daerah, sehingga perencanaan tersebut relevan dan efektif

dalam mendorong pembangunan lokal. Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum secara merata dan berkeadilan. Secara ringkas, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan, mempercepat kesenjangan antar wilayah, serta menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, proses pembangunan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kesenjangan antar wilayah, keterbatasan sumber daya, serta dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan tetap menjaga keseimbangan ekologi untuk generasi mendatang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung, sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan, memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota. Dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang di dalamnya terdapat analisis fiskal untuk menentukan alokasi anggaran pembangunan. Kualitas perencanaan dan analisis Bappeda sangat bergantung pada data proyeksi dan realisasi PAD sebagai dasar kemampuan fiskal daerah. Berikut ini adalah Tabel pendapatan Asli Daerah Kota Bitung 2019-2024.

Kota Bitung merupakan satu di antara kota strategis yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini memiliki potensi besar terutama di sektor pelabuhan, perikanan, industri, dan pariwisata. Sebagai pintu gerbang utama perdagangan laut menuju kawasan Asia Pasifik, Kota Bitung memiliki peranan penting dalam perekonomian regional maupun nasional.

Periode tahun 2019-2024 menjadi rentang waktu yang menarik untuk dikaji, mengingat terdapat dinamika kebijakan dan tantangan signifikan yang mungkin memengaruhi kinerja BAPPEDA Kota Bitung. Secara umum, periode ini mencakup tahun-tahun transisi pemerintahan daerah, penyesuaian terhadap regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang terus berkembang, serta dampak dari peristiwa luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang menuntut adanya refocusing anggaran dan program. Kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang baik harus mencerminkan visi, misi kepala daerah, serta kebutuhan riil masyarakat, selain itu juga harus selaras dengan rencana pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Perencanaan yang ideal harus didukung oleh instrumen finansial yang memadai, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi anggaran belanja pada BAPPEDA memiliki dua dimensi penting: pertama, realisasi anggaran untuk kegiatan internal BAPPEDA (seperti koordinasi, penelitian, dan penyusunan dokumen); dan kedua, sejauh mana perencanaan anggaran yang dikoordinasikan BAPPEDA mampu menggerakkan realisasi anggaran pada sektorsektor pembangunan lainnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Analisis terhadap perencanaan dan realisasi anggaran belanja di Kota Bitung menjadi penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung tujuan pembangunan. Rondinelli (2019) menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif dapat membantu negara-negara yang sedang berkembang dapat memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola ekonomi serta sosial. Maka dari itu, perencanaan pembangunan Kota Bitung sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga dapat mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, maka pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian ini ” Efektivitas Perencanaan Pembangunan dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Tahun 2019-2024” yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perencanaan pembangunan di Kota Bitung selaras dengan realisasi anggaran belanja, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Sejalan dengan latar belakang masalah sebelumnya, masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian efektivitas perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran belanja pada kantor badan perencanaan daerah (bappeda) kota bitung. Oleh karena itu, untuk memperjelas fokus arah penelitian, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas anggaran belanja BAPPEDA kota bitung selama periode Tahun 2019-2024?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi perencanaan dan/atau realisasi Anggaran belanja pada BAPPEDA Kota bitung selama periode 2019-2024?
3. Bagaimana dampak perekonomian kota bitung dari terealisasi anggaran kantor BAPPEDA Bitung?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perencanaan

Perencanaan adalah proses awal dalam suatu kegiatan yang berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala keegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Menurut Siagian (2005), perencanaan merupakan suatu proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perencanaan membantu dalam mengantisipasi tantangan di masa depan dan mengarahkan kegiatan agar tetap sesuai dengan tujuan. Noor (2023), Proses menentukan kebijakan dan program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dikenal sebagai perencanaan pembangunan. Larasati (2022, dalam Jalal Luddin 2023) dengan adanya perencanaan pembangunan maka dapat mempermudah akses dari suatu tempat ke tempat yang lain dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2.2. Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industrialternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, semuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999). Proses perencanaan pembangunan daerah di pengaruhi oleh dua kondisi yaitu kondisi dimana terdapat tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam produksi atau proses pembangunan perekonomiannya. Kondisi yang kedua yaitu kondisi yang memaparkan fakta bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara di pengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (kuncoro, 2004).

2.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan pengidentifikasian kebutuhan, penentuan prioritas, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan (Dennis Rondinelli, 1976). Rondinelli menekankan bahwa konsep dari perencanaan pembangunan harus di laksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, jelas, spesifik sehingga dapat di ukur dan di evaluasi dengan melibatkan partisipasi dari semua stakeholders, termasuk masyarakat, pemerintah, dan swasta. Tahapan perencanaan pembangunan menurut undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional. Seperti penyusunan rencana yang mencakup tinjauan keadaan, perkiraan keadaan masa depan, dan penetapan tujuan serta cara pencapaiannya. Rencana pembangunan dibagi menjadi tiga yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP) untuk periode 1 tahun. salah satu cara untuk berpartisipasi dalam perencanaan anggaran Menghadiri Musrenbang, atau Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Untuk menyusun APBD, musrenbang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Diharapkan bahwa musrenbang membantu menetapkan prioritas pembangunan sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Sopannah, 2012).

2.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Realisasi anggaran menggambarkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu yang ditentukan. Realisasi anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul “Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis” dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Halim 2004:74 (dalam Budi Santoso 2019) Keefektifan pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan kegiatan dan batasan anggaran yang ada secara tepat waktu, yang juga dapat berarti tercapainya tujuan dan sasaran yang direncanakan

2.5 Teori Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik

Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik merupakan landasan utama untuk menilai bagaimana BAPPEDA Kota Bitung mempertanggungjawabkan mandatnya. Secara sederhana, teori ini membahas tentang kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (masyarakat) atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi. Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2.6 Hubungan Akuntabilitas dengan *Value for Money* (vfm)

Teori akuntabilitas kinerja tidak bisa dipisahkan dari konsep *Value for Money*. Metode utama untuk menilai akuntabilitas tersebut adalah prinsip value for money (VfM). Menurut Mardiasmo (2023), tiga elemen utama harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kinerja sektor publik: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Aspek ekonomi menekankan bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan input dengan harga yang paling rendah sambil mempertahankan kualitas. Aspek efisiensi adalah ukuran seberapa efektif sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan output yang optimal. Aspek efektivitas, di sisi lain, menilai kemampuan output untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dicapai apabila program dan kegiatan dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan perencanaan tetapi juga mampu memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan tepat sasaran. Metode ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kualitas kinerja dan keuntungan yang dirasakan masyarakat.

Untuk dikatakan akuntabel, realisasi anggaran belanja BAPPEDA harus memenuhi tiga kriteria:
Ekonomi: Memperoleh input dengan harga termurah tanpa mengurangi kualitas.
Efisiensi: Menggunakan input yang minimum untuk menghasilkan output yang maksimal.
Efektivitas: Sejauh mana hasil (*outcome*) yang dicapai telah memenuhi target yang direncanakan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ibrahim *et all* (2020) dalam penelitiannya berjudul efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor badan pengelola keuangan daerah (BPKD) tujuan penelitian “untuk mengetahui perencanaan anggaran dengan evektivitas dan efisien realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dengan hasil dari rasio efektifitas BPKD anggaran pendapatan asli Daerah sebesar Rp.3.516.797.239.983,00 dan Realisasi Pendapaatan asli Daerah sebesar Rp. 3.449.561.308.104,52 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 98,08% dengan demikian diperoleh rasio evektivitas sebanyak 98% dikategorikan cukup evektivif.

Lutfi Diah Ariyani (2022) dalam penelitiannya Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Ekonomis, Efektivitas, serta Efisiensi pada BAPPEDA LITBANG Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja guna mengukur tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017–2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan konsep Value for Money dalam bentuk pengukuran Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Pengambilan data penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi langsung dengan kepala bagian keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil

penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo secara umum dikatakan baik. Hal ini berarti BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo telah berhati-hati dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran yang ada.

Kadek Srihandyani (2022) dalam penelitiannya *the effect of budget planning, budget implementation, and human resource competencies on budget realization at ganessa university of education*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki nilai signifikan sebesar $0,154 \pm 0,05$. Bahwa H1 ditolak artinya perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima artinya pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Terakhir, variable kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan sebesar $0,18 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan masalah dan landasan teoritis pada penelitian analisis perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran belanja pada kantor dinas badan perencanaan pembangunan (Bappeda) di kota bitung. Maka kerangka berfikir ilmiah dari penelitian ini dapat di uraikan dalam skema dan penjelasan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir Ilmiah



Sumber : Diolah Penulis

Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung merupakan lembaga teknis pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Bitung. BAPPEDA Kota Bitung berfungsi sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Perencanaan dan anggaran pembangunan mempunyai peran sangat penting sebagai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran dengan realisasi pembangunan yang dikelola oleh pemerintah dalam satu atau beberapa periode pelaporan dengan tampilan anggaran, beserta data penerimaan dan pengeluaran yang tersaji di masa lalu. Dalam mencapai sasaran Kantor Dinas Bappeda Kota Bitung harus melaksanakan perencanaan dan realisasi anggaran untuk mengetahui letak sistem pengendalian anggaran apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Analisis kinerja keuangan belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah dalam menggunakan APBD pada Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Hermawan, 2019). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat Kota

Bitung, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah informan, Nilai pagu anggaran belanja, Besaran nominal dana anggaran. Data yang diaplikasikan dalam kajian bersumber dari data sekunder, yaitu data mengenai realisasi anggaran 6 tahun dari tahun 2019-2024 di peroleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bitung.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Data Kuantitatif (utama)

Data berupa angka yang digunakan untuk mengukur variabel secara statistik, khususnya untuk variabel realisasi anggaran dan indikator capaian target perencanaan. Data yang diaplikasikan dalam kajian data sekunder, yaitu data mengenai realisasi anggaran 6 tahun dari tahun 2019-2024 di peroleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bitung.

- a. Untuk Realisasi Anggaran : Data Pagu (target) anggaran dan realisasi Belanja Bappeda tahunan.
- b. Untuk Efektivitas Perencanaan: Data persentase capaian indikator kinerja Bappeda dan Pemda (yang menjadi tanggung jawab Bappeda).

2. Data Kuantitatif (Pendukung)

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Informan yang penulis pilih sebagai informan kunci (Key Informan) dalam penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA Kota Bitung. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa Kepada BAPPEDA dianggap paling memahami Efektivitas Perencanaan Pembangunan dan Realisasi Anggaran Belanja Kntor Bappeda Kota Bitung.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Defenisi oprasional penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Efektivitas perencanaan pembangunan adalah tingkat keberhasilan proses perencanaan program pembangunan daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dilihat dari kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan pembangunan. Efektivitas Perencanaan Pembangunan di ukur LAKIP/LKPJ, laporan kinerja RKPD di ukur dalam skala poin.
2. Realisasi anggaran belanja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran pemerintah daaerah dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah disusun. LRA di ukur dalam satuan persen (%).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Kualitatif/Komparatif Kinerja. Hal ini dikarenakan penelitian ini melibatkan analisis data numerik (anggaran dan realisasi) serta data dokumen kebijakan (perencanaan) dan faktor-faktor pendukung/penghambat (kualitatif).

3.4.1 Analsis Deskriptif Kuantitatif

Metode analisis deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik terkait anggaran dan realisasi. Tujuannya adalah menyajikan gambaran kinerja keuangan BAPPEDA Kota Bitung secara faktual. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan target yang telah ditetapkan, merujuk pada standar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagaimana diaplikasikan dalam penelitian Sudiarsa (2013). Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis membandingkan kinerja keuangan anggaran RKPD pada tahun 2019-2024 pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung dengan Menghitung persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan. Efektif adalah kondisi Ketika suatu kegiatan atau program berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana hasil nyata yang diperoleh sesuai dengan target yang diinginkan. Rumus dari pada evektivitas adalah gambaran dari tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Bentuk rumus evekfitas tersebut adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Target Anggaran Belanja

Keputusan menteri dalam Negara Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Rasio Eektivitas (%)	Kriteria
≥ 100	Sangat Eektivif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

3.4.2 Analisis Komperatif Kinerja (Kualitatif dan Kuantitatif)

Metode ini digunakan untuk membandingkan dokumen perencanaan (output BAPEDDA) dengan implementasi keuangan (realisasi anggaran), serta menggali faktor-faktor penyebab dari temuan kauntitatif.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil

4.1.1 Hasil Tren Efektivitas Anggaran

Berdasarkan data Target dan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Bitung tahun 2019-2024, berikut adalah analisis Tingkat Efektivitas Anggaran (dihitung dari Persentase Realisasi terhadap Target) dengan mengacu pada kriteria umum efektivitas.

Tabel 3. Hasil Target, Realisasi, dan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Kantor Bappeda Kota Bitung Tahun 2019-2024

Tahun	Target/rencana (Rp)	Realisasi (miliar)	Persentase (%)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2019	2.922.297.873	1.258.000.000	43%	Tidak Efektif	Jauh di bawah target (di bawah 60%)
2020	2.306.677.800,00	89.652.040,00	4%	Tidak Efektif	Realisasi sangat minim di bawah 60%
2021	2.334.676.746,00	2.306.677.800,00	99%	Efektif	Realisasi mendekati target (90%-100%)
2022	8.001.215.761	2.958.991.625	37%	Tidak Efektif	Jauh di bawah target (di bawah 60%) target (di bawah 60%)
2023	16.148.060.372	15.152.565.288	94%	Efektif	Realisasi sangat baik (90%-100%)
2024	6.698.145.403	6.406.371.196	96%	Efektif	Realisasi sangat baik (90%-100%)

Sumber RKPD, RPJMD Kota Bitung Tahun 2019-2024Tahun 2019: Faktor Non-Covid-19,

- a. Tingkat efektivitas di tahun 2019 adalah 43%, di mana saat itu Pandemi COVID-19 belum terjadi.
- b. Tahun 2020: Dampak Refocusing Anggaran COVID-19, Tingkat efektivitas Bappeda Kota Bitung pada tahun 2020 hanya 4% (Rp89,6 Juta dari Target Rp2,3 Miliar). Angka ini sangat ekstrem dan hampir pasti disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat terkait COVID-19. Walikota Bitung sendiri telah mengkonfirmasi bahwa APBD 2020 terdampak dan sekitar 50% anggaran harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pergeseran ini terjadi di semua SKPD, termasuk Bappeda.

- c. Tahun 2022: Lanjutan Dampak dan Dinamika Lain Tingkat efektivitas di tahun 2022 juga rendah, yaitu 37% (Rp2,9 Miliar dari Target Rp8 Milliy).

4.1.2 Faktor-faktor (Internal dan Eksternal) Perencanaan Pembangunan dan Realisasi Anggaran

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Perencanaan Pembangunan dan Realisasi Anggaran pada periode 2019-2024 memiliki kekhasan, terutama karena periode tersebut mencakup transisi peraturan baru (PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020) serta dampak luar biasa dari Pandemi COVID-19 (2020-2022).

1) Faktor Eksternal Dominan (COVID-19 dan Regulasi)

Faktor-faktor ini merupakan tantangan terbesar pada periode ini karena memaksa perubahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara mendadak.

- a. Dampak Pandemi COVID-19 (2020-2022) Refocusing dan Realokasi Anggaran
- b. Perubahan dan Implementasi Regulasi

2) Faktor Kualitas Perencanaan (Input)

Ini adalah faktor internal Bappeda dan OPD yang memengaruhi seberapa realistis dan siap rencana tersebut untuk dieksekusi. Perencanaan yang Tidak Realistis:

Anggaran Atas Dasar (Asumsi): Adanya anggapan bahwa anggaran akan disetujui 100%, sehingga OPD menyusun rencana tanpa mempertimbangkan kapasitas realisasi dan kebutuhan riil.

3) Faktor Pelaksanaan dan SDM (Proses dan Pendukung)

Faktor ini berkaitan dengan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam menjalankan program.

- a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Keterlambatan Proses Tender
- b. Ketakutan Hukum (APH): Adanya kekhawatiran dari pengelola anggaran

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran pada periode 2019-2024 dipengaruhi oleh guncangan eksternal (Pandemi), transisi regulasi yang cepat, dan kelemahan struktural internal (SDM dan PBJ). Periode 2019 hingga 2024 merupakan masa yang sangat dinamis, yang mencakup tahun-tahun normal dan masa perubahan masif akibat pandemi COVID- 19, sehingga hasil efektivitas cenderung berfluktuasi.

4.1.3 Dampak Perekonomian Kota Bitung dari Realisasi Anggaran Kantor BAPPEDA Bitung

Berikut ini adalah tabel tentang dampak perekonomian dan realisasi anggaran kantor bappeda kota bitung berdasarkan wawancara dari bidang analisis keuangan pusat/daerah ahli muda.

Tabel 4. Dimensi Dampak Secara Tidak Langsung Realisasi Anggaran Kantor Bappedda Kota Bitung

Aspek	Uraian	Keterangan
Dampak Kelembagaan	Memberikan Blooming Scheme dalam meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan sistem informasi.	Tidak Langsung
Dampak Anggaran	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih baik.	Tidak Langsung
Dampak Kesejahteraan	Mendukung penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM melalui program dokumen perencanaan yang disusun.	Tidak Langsung

Sumber : Wawancara bidang analisis keuangan BAPPEDA Bitung

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja BA PPEDA Kota Bitung Selama Periode Tahun 2019-2024

Efektivitas anggaran adalah indikator yang mengukur sejauh mana sebuah organisasi atau instansi mencapai tujuan, sasaran, atau target yang direncanakan melalui penggunaan anggaran belanja yang tersedia. Pada konteks akuntansi sektor publik, efektivitas tidak hanya bicara tentang menghabiskan uang,

melainkan tentang “pencapaian hasil” (outcome). Artinya, efektivitas menjawab pertanyaan apakah uang yang dikeluarkan berhasil memberikan hasil yang diinginkan. Tingkat efektivitas belanja biasanya diukur melalui Rasio Varians Belanja, yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin

4.2.2 Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran belanja BAPPEDA Kota Bitung

1. Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran belanja BAPPEDA Kota Bitung selama periode 2019-2024 berpusat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyusun dokumen perencanaan yang akurat serta pemahaman mereka terhadap regulasi keuangan yang dinamis. Selain itu, kemampuan adaptasi teknologi terhadap sistem digital seperti SIPD, komitmen kepemimpinan dalam melakukan pengawasan rutin antar 73 bidang, serta kedisiplinan administratif dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban menjadi penentu utama kelancaran penyerapan anggaran. Efektivitas ini juga sangat bergantung pada ketepatan penjadwalan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel di dalam organisasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran belanja BAPPEDA Kota Bitung periode 2019-2024 didominasi oleh kebijakan transfer dana pusat (DAU/DAK) yang fluktuatif serta dinamika regulasi nasional, terutama transisi sistem ke SIPD yang sering mengalami kendala teknis secara terpusat. Selain itu, dinamika politik lokal terkait ketepatan waktu pengesahan APBD oleh DPRD, kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang memengaruhi harga satuan barang dan jasa, menjadi variabel luar yang memaksa BAPPEDA untuk terus melakukan penyesuaian rencana kerja secara responsif.

4.2.3 Dampak Perekonomian Kota Bitung dari Realisasi Anggaran Kantor BAPPEDA Bitung

Realisasi anggaran BAPPEDA Kota Bitung secara ekonomi berdampak sebagai stimulus terhadap pembangunan daerah melalui fungsinya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi. Meskipun secara nominal belanja BAPPEDA tidak sebesar belanja infrastruktur di dinas teknis, ketepatan realisasi anggarannya berperan vital dalam menjaga kepercayaan investor dan kepastian iklim usaha melalui kebijakan RKPD yang strategis. Selain itu, penyerapan anggaran pada kegiatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada efisiensi alokasi sumber daya ekonomi di Kota Bitung, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pengendalian inflasi lokal, serta memastikan program-program pengentasan kemiskinan dan pengembangan sektor industri pelabuhan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Anggaran Bersifat Fluktuatif dan Belum Konsisten.
2. Faktor Eksternal Berpengaruh Dominan. Penurunan drastis tingkat efektivitas pada Tahun 2020 (4%) dan 2022 (37%) secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat terkait Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19.
3. Kualitas Perencanaan Anggaran Menunjukkan Perbaikan.
4. Tantangan Perencanaan Anggaran Menunjukkan Perbaikan.
5. Realisasi anggaran BAPPEDA Kota Bitung memiliki peran sebagai katalisator pembangunan yang memberikan dampak ekonomi secara tidak langsung namun fundamental bagi stabilitas dan pertumbuhan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. (*No Title*).

Budi Santoso. 2019” Effectiveness of Regional Development Planning and Budget Realization in Local Government Agencies”

- Hermawan, I., & Pd, M. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran.
- Ibrahim, Lilly, Muh Nur Abdi, dan Elyang. 2020. "Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor BPKD Prov. Sul Sel Tahun 2016-2017" (Jurnal Ilmu Manajemen Profitability 4) No. 1 pp. 23-49
- Jalal Luddin. 2023. "Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara" (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra) Vol 4 No 5
- Lutfi Diah Ariyani. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Ekonomis, Efektivitas, serta Efisiensi pada BAPPEDA LITBANG Ponorogo"(Jurnal Manajemen) Vol. 4 No. 4 (2025): Oktober 2025
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Melanja Rampengan. 2016. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado" (Journal Unsrat) Vol. 16 No. 3 (2016): Jilid 6
- Noor Shaky Iskandar. 2023. "Buku Saku Perencanaan Pembangunan" (Bappeda Kota Tangerang)
- Pemerintah Kota Bitung. (2018-2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung. Bitung: Bappeda Bitung
- Pemerintah Kota Bitung. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2021-2026. Bitung
- Siagian, S.P. 2016. *Manajemen Strategik*. Penerbit Jakarta: Bumi Aksara.
- Sopannah, A. (2012). Ceremonial budgeting: public participation in development planning at an Indonesian local government authority. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 10(2), 73.
- Sudiarsa, Ketut. 2013 "Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran Value for Money" (Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha) No. 1 (1)